

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH
MELALUI IMPLEMENTASI
MODEL PENDIDIKAN HOLISTIK BERBASIS KARAKTER**

DR. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD

DR. Ir. Ratna Megawangi, MSc.

Orasi pada Rapat Senat Terbuka
dalam Rangka Dies Natalis ke-45 Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh
Sabtu, 2 September 2006

Yth. Rektor Universitas Syiah Kuala,
Yth. Anggota Senat Universitas Syiah Kuala,
Yth. Para sivitas akademika Universitas Syiah Kuala,
Yth. Para undangan dan hadirin lainnya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

A. Undang Undang Pemerintahan Aceh: Momentum Titik Balik Kemegahan Aceh

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh merupakan momentum titik balik upaya untuk kembali menegakkan kemegahan Aceh setelah sekian lama tenggelam dalam konflik kekerasan dan musibah. Undang-undang ini memberikan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan di Aceh yang otonom diharapkan dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan dan kemajuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Kemandirian secara bertanggungjawab merupakan kata kunci sebagaimana tercermin pada kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya alam sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Perdagangan diharapkan akan semakin lancar dengan kewenangan untuk melakukan perdagangan tanpa hambatan. Secara fiskal, Aceh mendapat porsi pembagian yang lebih besar dalam banyak hal dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Di samping ditopang pendanaan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) yang lebih besar, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK)) dan dana otonomi khusus. Yang terakhir ini jumlah sangat besar, yaitu 2% untuk 15 tahun pertama dan 1% untuk 5 tahun berikutnya. Ini berarti, mulai tahun 2008, Aceh akan memperoleh dana otsus paling sedikit Rp 3.5 Trilyun dan

meningkat antara 15-20% tiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber pembiayaan pembangunan juga ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD, pajak, dan retribusi daerah), dan pendapatan lainnya yang sah.

Tentu hal tersebut harus disyukuri dengan cara memanfaatkan anggaran tersebut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat di Aceh. Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana menyusun prioritas penggunaan anggaran tersebut sedemikian rupa sehingga tidak hanya sekedar menjadi sekedar bangunan fisik yang kurang berguna, atau bahkan menjadi terbuang percuma karena tidak didasarkan pada kebutuhan yang nyata bagi rakyat di Aceh sekarang dan di masa yang akan datang.

Hal terpenting yang harus disadari adalah bagaimana pembangunan modal sosial (*social capital*), sebagai kunci utama bagi pembangunan berkelanjutan di NAD, dapat sepenuhnya dilaksanakan, sehingga tercapai masyarakat yang damai dan sejahtera. Banyak bukti menunjukkan bahwa masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang modal sosialnya tinggi, yaitu tercermin dari kehidupan sosialnya yang damai, sedikit konflik, ada kebersamaan dan saling percaya, serta terdapat tingkat toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang mirip dilontarkan oleh Francis Fukuyama (*Trust: The Social Virtues, and the Creation of Prosperity*, 1995)¹, yang memfokuskan kepada ciri budaya sebuah masyarakat yang mempunyai keunggulan dalam persaingan global. Dalam bukunya ini Fukuyama percaya bahwa keunggulan suatu masyarakat dan negara yang dapat *survive* dalam abad ke-21, adalah ditentukan oleh faktor *social capital* (modal sosial) yang tinggi, yaitu *high trust society*. Negara yang mempunyai modal sosial tinggi adalah masyarakat yang mempunyai rasa kebersamaan tinggi, rasa saling percaya (baik vertikal maupun horizontal), serta rendahnya tingkat konflik. Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini bisa terwujud kalau masing-masing individu dan golongan masyarakat menjunjung tinggi rasa saling hormat, kebersamaan, toleransi, kejujuran, dan menjalankan kewajibannya.

Pemerintah Daerah, sebagai institusi penting dalam kehidupan masyarakat, memegang peran besar dalam mewujudkan modal sosial, melalui penciptaan iklim *high trust society*, terutama melalui pemerintahan yang bersih, serta kebijakan pemerintah yang dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, beretos kerja tinggi, peduli, penuh kasih sayang, serta karakter mulia lainnya. Termasuk juga bagaimana Pemda dapat menuangkannya dalam strategi kebijakannya dalam bidang pendidikan, dan pembangunan masyarakat lainnya, yang terfokus dalam meningkatkan modal sosial masyarakat NAD.

B. Mewujudkan *Good Governance* dan *Good Social Responsibility*

Faktor yang paling menentukan bagi terciptanya kedamaian sebuah negara atau masyarakat, adalah bukan dari terbebasnya ancaman militer dari luar, tetapi justru ditentukan oleh ada-tidaknya internal konflik, seperti perang saudara, kekerasan dan kejahatan dalam masyarakat, serta runtuhnya pranata sosial yang membuat masyarakat tidak tertib, dan tidak patuh hukum. Menurut Loren Cobb², pemerintahan yang korup,

dengan birokrasinya yang besar dan tidak efisien, adalah salah satu akar dari adanya penyakit sosial dalam masyarakat, yang disebut oleh Cobb sebagai *spoil system*. Hal ini bermula dari adanya “hutang” yang harus dibayar ketika para birokrat menduduki sebuah jabatan publik karena adalannya campur tangan para elit politik dari partai-partai tertentu. Berhubung kekuatan politik sangat ditentukan oleh besarnya dana, para birokrat yang gajinya kecil, harus “menyetor” sehingga harus mencari dana tambahan, yang tentunya harus diambil dari masyarakat yang memerlukan jasanya (pungli), atau dari dana proyek-proyek pembangunan (komisi atau *kick-back*, *mark-up* nilai proyek, dan bentuk KKN lainnya). Begitu pula, kebiasaan suap-menyuap untuk menjadi pegawai negeri, sehingga uang suap yang dikeluarkan harus kembali modal, yang akan dicarinya ketika menjalankan tugas kepegawaiannya.

Tentunya, semakin banyak jasa yang diberikan oleh para birokrat dengan instrumen pegawai negerinya, semakin banyak peraturan yang dibuat, agar semakin banyak ijin yang harus dikeluarkan, sehingga semakin banyak uang “jasa” yang diperoleh. Begitu pula, semakin banyak proyek yang dibuat pemerintah, semakin besar dana yang “bocor”, atau mengalir ke kantong birokrat dan kroni-kroninya. Kebiasaan ini menurut Cobb banyak terjadi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, dan ternyata juga terjadi di Indonesia, terutama di jaman-jaman pemerintahan sebelumnya, sehingga Indonesia dalam tahun-tahun yang lalu, mendapatkan peringkat negara terkorup di Asia, termasuk salah satu terkorup di dunia.³

Sistem birokrasi yang korup ini amat mempengaruhi perilaku masyarakatnya, sehingga seluruh lapisan masyarakatnya pun akan menjadi korup, misalnya, seorang pebisnis yang awalnya baik dan jujur, tetapi dipaksa menyuap ketika berhubungan dengan aparat birokrasi, karena kalau tidak, ijin usaha tidak bisa keluar, maka ia pun sudah terlibat dengan perbuatan yang tidak jujur yang lama kelamaan akan membunuh nuraninya karena menjadi terbiasa melakukannya. Hal ini terjadi di seluruh lini kehidupan masyarakat (dari membuat KTP, SIM, dan sebagainya). Inilah akar dari terjadinya dekadensi moral yang merupakan runtuhnya modal sosial masyarakat, dimana masyarakat menjadi saling curiga, tidak percaya kepada pemimpinnya, kesal dan marah, serta kebencian, yang semuanya adalah sifat-sifat laten (“bom”) yang apabila dipicu, mudah meledak dalam bentuk konflik dan kekerasan di dalam masyarakat. Sifat-sifat ini akan mewarnai kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya, maupun dalam beragama dan berpolitik yang semuanya dilandasi oleh rasa saling curiga, egoisme kelompok (merasa diri/kelompok paling benar),

Oleh karena itu, apabila di NAD tercinta ini ingin mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan yang langgeng, maka prasyarat utamanya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Sistem atau struktur pemerintahan harus direformasi, di mana setiap aspek yang dianggap memberikan peluang korup harus dihilangkan, dan seluruh pegawai negeri dari tingkat atas sampai bawah, harus bersikap profesional di dalam menjalankan tugasnya. Termasuk bagaimana merampingkan birokrasi agar menjadi efisien, yang tentunya harus merampingkan jumlah pegawainya (paling tidak menyetop tingkat penerimaan pegawai yang tidak perlu, atau jika ada penerimaan baru harus didasarkan atas merit, kemampuan dan kompetensi, bukan karena

pertimbangan nepotisme, keluarga, satu daerah, satu almamater dan pertimbangan lainnya yang tidak relevan), dan mendidik masyarakat untuk mempunyai mental independen dan spirit wirausaha (*entrepreneurship*). Tentunya ini memerlukan usaha keras dan proses yang panjang, namun sejak sekarang harus ada *political will* untuk melakukannya secara konsisten. Keberhasilan negara-negara Eropa dalam mereformasi sistem birokrasinya telah dilakukan sejak abad ke-19, dan inilah salah satu sebab mengapa negara-negara Eropa yang tadinya banyak terlibat di dalam konflik dan peperangan, menjadi negara-negara yang relatif damai dan sejahtera karena pembangunan modal sosialnya dimulai dari sistem pemerintahan yang bersih, yang sesuai dengan etika *good governance*.

Satu hal lagi yang amat “membahayakan” dalam kondisi Aceh sekarang, adalah melimpahnya dana pemerintah daerah seperti yang telah disebutkan pada awal tulisan ini, yang bisa menjadi “petaka” bagi masyarakat Aceh. Sebagai uraiannya, saya ingin memakai istilah “penyakit” yang disebut “*Dutch Disease*”, yaitu suatu istilah dalam konsep *Economic Development*. Istilah ini mengacu pada negara-negara yang ketergantungan kepada sumberdaya alam yang sangat besar, di mana pemerintahnya mendapatkan uang hasil “bukan dari keringat sendiri” yang amat besar, sehingga akan membuat rakyatnya cenderung malas, tidak memiliki etos kerja dan menjadi tergantung kepada pemerintah. Ada 2 hal mengapa penyakit ini bisa timbul. Pertama, pemerintah dengan uangnya yang melimpah, akan membuat banyak proyek-proyek pembangunan, yang biasanya dibarengi oleh praktek-praktek KKN. Alokasi sumber dana tersebut tidak selamanya bersifat adil dan memuaskan semua pihak, maka hal ini potensi menciptakan iri hati, kecemburuan sosial, yang merupakan benih-benih dari terjadinya konflik sosial

Kedua, pemerintah cenderung akan menggunakan dana tersebut untuk berbagai proyek yang dapat menyenangkan hati rakyat. Apalagi dalam iklim demokrasi dengan proses Pilkada, dimana banyak para pemimpin yang mengobral janji-janji agar dipilih (lagi), sehingga menjalankan sederetan program yang “menyusui” rakyat melalui program pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan bentuk-bentuk subsidi lainnya yang akan membuat masyarakat sulit untuk “disapah” karena sudah terlanjur keenakan (bahkan sampai matipun rakyat bisa mendapatkan subsidi, karena ada pemda yang merencanakan kain kafan gratis). Dampak negatif di sisi pembangunan kekuatan ekonomi rakyat adalah melemahnya kekuatan ekonomi tradisional masyarakat dan dari segi sosial lahirlah sebuah generasi yang hanya tergantung kepada kemurahan pemerintah (*entitlement attitude*), yang tahu hanya menuntut, malas, dan tanpa etos kerja (lihat juga artikel lampiran 1). Dampak negatif seperti ini telah diidentifikasi sejak tahun 1980an, dimana salah satu buku yang cukup provokatif menganalisis dampak dari uang yang diterima oleh berbagai negara produsen minyak dan gas bumi. Buku tersebut berjudul “*Oil Winfalls: Blessing or Curse?*”⁴ (Uang Minyak: Rahmat atau Kutukan?) Temuan dari penelitian tersebut adalah uang minyak ternyata lebih banyak membawa malapetaka dari pada rahmat bagi negara-negara penghasil minyak tersebut (atau pemerintah daerah yang mendapatkan uang melimpah).

Ada lagi sebuah teori yang dapat dipakai analoginya bagaimana sebuah pemerintahan yang uangnya melimpah justru dapat membuat masyarakat tersebut bangkrut secara

ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu yang disebut “*the Rybczynski theorem*”⁵. Teori ini mengatakan bahwa sebuah negara yang mengembangkan potensi sumberdaya alamnya seperti minyak bumi dan gas alam (analog, sektor publik dari budget pemerintah), cenderung menghambat perkembangan sektor produksi lainnya, terutama pada sektor industri atau manufaktur. Proses de-industrialisasi biasanya akan terjadi ketika sebuah negara/daerah yang banyak mendapatkan devisa besar dari hasil sumberdaya alamnya, tetapi “terlena” sehingga tidak melakukan investasi dalam sektor pertanian, industri, yang dalam jangka panjang negara tersebut akan menjadi miskin, karena tidak mempunyai “*comparative advantage*” apa-apa. Nigeria, sebuah negara yang kaya minyak, adalah contoh klasik dari negara yang terkena penyakit *Dutch Disease*, dan negara ini sekarang telah menjadi negara miskin dengan segala macam kemelut sosialnya.

Pemerintah Daerah yang mendapatkan uang banyak tanpa harus mengeluarkan keringat, ibarat orang yang mendapat uang dengan mudah (“*easy money*”). Biasanya, “*easy money*” akan membuat “*easy to spend*”. Maka, jadilah bangsa yang disebut “*consumer society*” (masyarakat konsumtif). Masyarakat konsumtif biasanya orientasinya ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, karena ingin cepat mengkonsumsi. Berlainan dengan masyarakat produsen yang ingin mengorbankan hari ini dengan bekerja keras, belajar rajin, menabung dulu, demi masa depan yang menyenangkan, masyarakat konsumtif ingin mendapatkan kesenangan sekarang, dengan mengorbankan masa depan.

Celakanya lagi, pemerintahan yang berlimpah uang “bukan hasil keringat sendiri”, cenderung bersikap populis dengan memberikan subsidi dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya. Akibatnya, masyarakat menjadi lemah, tidak mempunyai daya juang, dan tidak bisa bekerja keras atau berdikari (berdiri di kaki sendiri), karena sudah terlalu banyak kemudahan sehingga akan terus minta “disusui”. Dampak negatifnya bisa begitu meluas, yaitu terjadinya dekadensi moral yang merembes ke seluruh lapisan, karena umumnya masyarakat yang demikian hanya bisa menuntut, dan tidak mau bertanggung jawab untuk kepentingan dirinya dan keluarganya (contoh, karena serba gratis, banyak orangtua yang tidak berjuang keras untuk menjadi sehat dan membuat anaknya pintar), dan biasanya masyarakat demikian akan mudah marah (terbiasa menuntut dan tidak puas), dan sifat ini akan tertanam menjadi “bom” yang tinggal menunggu pemicunya untuk meluapkan kemarahannya, dan sekali lagi akan mewarnai kehidupan bermasyarakatnya yang penuh dengan kebencian dan konflik sosial.

Karenanya, strategi kebijakan pembangunan pemerintah harus diarahkan bagaimana modal sosial masyarakat harus ditingkatkan, karena mengingat kekayaan alam yang terus dieksploitasi akan habis pada suatu saat, dan tidak dapat diperbaharui dan dana otsus akan berakhir setelah 20 tahun, maka penyiapan secara dini untuk membangun karakter masyarakatnya harus dilakukan segera. Kualitas SDM yang berkarakter, mempunyai spirit kerja tinggi, dan mandiri, adalah bekal yang membawa kejayaan bangsa di masa depan. Spirit budaya bangsa seperti ini tidak akan pernah habis, bahkan akan menjadi rahmat besar di masa depan.

Ada sebuah kepercayaan bahwa sebuah negara yang berhasil adalah negara yang memproduksi melalui pengembangan industri termasuk sektor pertanian dan ekspansi

manufaktur, atau berdagang (*merchant*), bukan negara yang proyek pemerintahannya besar. Untuk itu, sikap kerja keras, dedikasi, dan keahlian (*workmanship*) yang dimiliki SDMnya pada semua lini produksi merupakan kunci utama yang harus dimiliki. Artinya, negara tersebut akan memberikan prioritas pada pengembangan karakter SDM yang kondusif untuk sebuah masyarakat produsen (*producer society*). Contohnya, Jepang, Korea, Taiwan (dan Cina daratan yang sekarang sedang pesat tumbuh), adalah negara-negara yang terkenal sebagai negara produsen yang handal, dan karakter bangsanya terkenal sebagai bangsa yang mempunyai etos kerja tinggi, hemat, dan mau “bersusah-susah dulu” untuk “membangun istana masa depan”. Contoh Hong Kong dan Singapura yang telah disebutkan di depan, adalah kawasan liliput yang tidak mempunyai sumber daya alam sama sekali. Namun keduanya boleh bangga karena termasuk yang terkaya di dunia, karena etos kerja dan kualitas kerjanya yang bagus.

Uraian tersebut di atas membuktikan kebenaran pendapat bahwa adalah faktor modal sosial (menyangkut nilai dan karakter) yang menentukan sebuah bangsa bisa maju. Kottler (1990)⁶ mengatakan bahwa kunci sukses keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana suatu negara mempunyai budaya yang kondusif untuk bisa maju. Faktor budaya ini tercermin dari kualitas karakter dan perilaku masyarakatnya, yang disebut “modal sosial” (*social capital*).

C. Strategi Kebijakan Pendidikan yang Memperkuat Modal Sosial

Dahulu proses pendidikan sangat melibatkan peran dari masyarakat mulai dari proses pendirian gedung, penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung, pemberian remunerasi kepada guru-guru, termasuk pengawasan proses belajar-mengajar. Bahkan masyarakat secara bergantian mengolah kebun atau ladang yang hasilnya secara rutin digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Apabila terjadi kerusakan pada bangunan sekolah atau terjadi sarana pendukung yang belum tersedia, maka masyarakat sekitar lokasi sekolah bergotong-royong memberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sekolah tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, proses pembangunan selama ini tampaknya telah menyebabkan pemisahan peran serta masyarakat atas tanggung jawab dalam penyelenggaraan proses pendidikan, dan kemudian diambil alih oleh Pemerintah. Akibatnya ketika sekolah mengalami masalah, masyarakat sekitar mengabaikan masalah tersebut karena merasa bukan tanggung jawab mereka lagi. Kondisi semacam ini harus diubah total. Masyarakat setempat harus ikut bertanggung jawab atas proses pendidikan dan penyelenggaraan sekolah yang berlangsung di sekitar mereka.

Sewaktu belum ada sekolah-sekolah Inpres, sekolah harus diselenggarakan atas dasar *community-based*, yaitu dimiliki oleh masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat. Guru pun diambil dari masyarakat setempat dan dibayar oleh masyarakat. Kita juga bisa belajar dari sejarah bagaimana kemajuan dan kemakmuran Kerajaan Aceh Darussalam di masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejayaan *jameun dilee* sangat ditentukan oleh sistem pendidikan pada masa itu dan adanya independensi masyarakat yang tinggi dan segala kreatifitas yang mereka miliki.

Seperti yang diuraikan dalam artikel DR. M. Shabri Abdul Madjid⁷, kita bisa pelajari bagaimana laporan penjelajah dari Perancis, Beaulieu, yang melawat ke Aceh pada abad ke-17, yang menyatakan bahwa pada kurun tersebut Aceh tidak mengenal lagi masyarakat yang buta huruf. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), di Aceh telah berdiri dengan megahnya sebuah institusi pendidikan tinggi yang setingkat dengan Universitas yang diberi nama dengan *Jami'ah Baiturrahman*, yang berlokasi di Mesjid Baiturrahman, masjid terbesar kebanggaan rakyat Aceh. Dalam sistem pendidikan di *Jami'ah* ini sudah diintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama untuk diajarkan kepada para mahasiswa. Hal ini dapat kita lihat dari nama ke-17 fakultas (*Daar*) yang ada pada saat itu, yaitu (1) *Daar al-Tafsir wal Hadis* (Fakultas Tafsir dan Hadis); (2) *Daar al-Thib* (Fakultas Kedokteran); (3) *Daar al-Kimiya* (Fakultas Kimia); (4) *Daar al-Taarikh* (Fakultas Sejarah); (5) *Daar al-Hisaab* (Fakultas Matematika); (6) *Daar al-Siyasah* (Fakultas Ilmu Politik); (7) *Daar al-Aqli* (Fakultas Ilmu Logika); (8) *Daar al-Ziraah* (Fakultas Pertanian); (9) *Daar al-Ahkaam* (Fakultas Hukum); (10) *Daar al-Falsafah* (Fakultas Filosofi); (11) *Daar al-Kalam* (Fakultas Teologi); (12) *Daar al-Wizaarah* (Fakultas Ilmu Pemerintahan); (13) *Daar al-Khazanah Bait al-Maal* (Fakultas Keuangan/Akuntansi Negara); (14) *Daar al-Ardh* (Fakultas Pertambangan); (15) *Daar al-Nahwu* (Fakultas Sastra Arab); (16) *Daar al-Mazahib* (Fakultas Perbandingan Mazhab); dan (17) *Daar al-Harb* (Fakultas Ilmu Militer). Lembaga pendidikan yang sangat berwibawa ini menjadi sentra pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya untuk Aceh saja tetapi juga merambah kawasan regional manca negara. Tenaga pengajar dan guru besar di *Jami'ah* ini mencakup juga ulama-ulama besar yang bukan berketurunan Aceh, seperti Syeikh Nuruddin ar-Raniry, Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani, dan Syeikh Hamzah al-Fansury.

Ironisnya, seiring dengan kemajuan jaman yang bahkan sekarang memasuki abad ke-21 yang ultra modern, kualitas pendidikan kita semakin menurun. Khusus untuk kondisi di NAD, adanya konflik berkepanjangan, termasuk banyaknya infrastruktur pendidikan yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, memang bisa dijadikan salah satu alasan. Namun, yang lebih penting lagi, adalah kualitas “software” pendidikan yang mencakup visi dan tujuan pendidikan yang akan dicapai, strategi, kurikulum, kualitas tenaga pengajar yang memahami metode pedagogi yang benar, dan bagaimana sekolah dapat membentuk karakter SDM yang tangguh, yang semuanya ini luput dari perhatian pemerintah, dan ini terjadi secara nasional, bukan di NAD saja.

Saya berpendapat bahwa inilah kesempatan emas bagi provinsi NAD dengan otonomi khususnya untuk mengadakan reformasi pada sistem pendidikannya, yang boleh berbeda dengan kebijakan pendidikan nasional. Provinsi NAD mempunyai peluang besar sekali, yang jauh berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya (apalagi dengan dana melimpah), dan karenanya NAD harus bisa menjadi pioneer pembaharuan pendidikan, dan bisa menjadi contoh sukses bagi provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu, jangan buang kesempatan emas ini hanya dengan “mendengarkan lagu lama” lagi, atau “*business as usual*”, yang sudah terbukti gagal menciptakan SDM yang tangguh.

Tentunya, mulai sekarang provinsi NAD harus sudah mulai mengkaji dan menyusun strategi kebijakannya dalam bidang pendidikannya, yang meliputi beberapa aspek.;

Pertama, mengkaji apakah visi dan tujuan pendidikan yang selama ini dilakukan sudah tercapai. Sejak 2400 tahun yang lalu Socrates telah berkata bahwa tujuan yang paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi “good and smart”, yang artinya selain menjadikan manusia berbudi luhur/bijak, juga sebagai manusia yang cerdas, kreatif, kritis, serta yang haus ilmu. Hal ini sebetulnya sudah dijabarkan oleh pemerintah dalam Undang-undang pasal 3 nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berbunyi : *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”*.

Namun kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang setelah lebih 60 tahun penyelenggaraan pendidikan dijalankan, maka sudah selayaknya kita mempertanyakan “apa yang salah dengan sistem pendidikan nasional kita?” Banyaknya kasus keterlibatan remaja dalam tawuran, penggunaan narkoba, dan bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya, adalah jauh dari gambaran remaja terdidik yang berbudi luhur dan bertanggung jawab. Juga perilaku orang dewasanya lulusan sekolah lanjutan atau universitas yang tidak independen, etos kerja yang rendah, tidak kreatif dan bertindak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moral, yang juga merupakan buah dari bagaimana mereka dididik sebelumnya.

Kedua, mempertanyakan apakah strategi pendidikan kita sudah benar. Strategi pendidikan di Indonesia sebetulnya hanya menyiapkan para siswa untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, atau hanya untuk mereka yang memang mempunyai bakat pada potensi akademik (ukuran IQ tinggi). Hal ini terlihat dari bobot mata pelajaran yang diarahkan kepada pengembangan dimensi akademik siswa saja, yang sering diukur dengan kemampuan logika-matematika dan abstraksi (kemampuan bahasa, menghafal, abstraksi – atau ukuran IQ). Padahal ada banyak potensi lainnya yang perlu dikembangkan, karena berdasarkan teori Howard Gardner⁸ tentang kecerdasan majemuk, potensi akademik hanyalah sebagian saja dari potensi-potensi lainnya.

Oleh karena itu, banyak materi pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan otak kanan (seperti kesenian, keterampilan, musik, imajinasi, dan pembentukan karakter) kurang mendapatkan perhatian. Walaupun ada, maka orientasinya pun lebih kepada kognitif (hafalan), tidak ada apresiasi dan penghayatan yang dapat menumbuhkan kegairahan untuk belajar dan mendalami materi lebih lanjut. Celaknya, pendekatan yang terlalu kognitif telah mengubah orientasi belajar para siswa menjadi semata-mata untuk meraih nilai tinggi. Hal ini dapat mendorong para siswa untuk mengejar nilai dengan cara yang tidak jujur, seperti mencontek, menjiplak, mengupah pembuatan skripsi dan sebagainya.

Hukum alam selalu menunjukkan bahwa dimana pun di muka bumi ini, yang memiliki potensi akademik (IQ) tinggi di atas 115, tidak lebih dari 15 persen penduduk, dan bobot kurikulum kita dibuat hanya untuk dapat diikuti oleh mereka yang potensi IQnya tinggi. Namun sebagian besar penduduk (85%) adalah mereka yang kecerdasannya bukan pada dimensi akademik (ilmuwan, pemikir, dan ahli strategis), tetapi pada dimensi-dimensi lainnya – misalnya pekerjaan teknisi, musisi, manual (motorik), artis, atau hal-hal lain yang sifatnya “lebih konkrit”. Kualitas produksi barang dan jasa pun sangat tergantung pada kualitas segmen penduduk yang mayoritas ini. Tantangannya adalah apakah penduduk mayoritas ini sudah dipersiapkan untuk dapat bekerja secara profesional sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi?

Sedangkan di Jepang, strategi pendidikannya adalah menyiapkan 85% penduduk menjadi pekerja yang profesional dan handal (sekolah kejuruan). Di Swedia sejak SLTA sebagian besar (lebih dari 80%) memilih bidang-bidang kejuruan. Bahkan di Singapura, sejak tingkat SLTP sebagian besar siswa sudah diarahkan untuk masuk *vocational school* atau *technical school*. Hanya segelintir siswa saja yang masuk jalur level A (langsung ke universitas). Kebalikannya di Indonesia, 85 persen siswa masuk ke SMA (jalur yang seharusnya untuk masuk universitas), dan hanya 15% yang masuk ke SMK, dan itu pun dianggap sebagai jurusan yang tidak bergengsi. Hal ini dapat menerangkan mengapa kualitas tenaga kerja Indonesia rendah sekali, karena sebagian besar tidak terdidik menjadi manusia yang terampil. Karena strategi kita bertentangan dengan hukum alam yang penuh keragaman potensi dan bakat, dan seluruh siswa harus diseragamkan bakatnya hanya pada bidang akademis saja, maka jadilah kualitas SDM kita seperti yang sekarang ini.

Muhammad Sjafei pernah berkata: ”Jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tapi, jadikanlah setiap pohon menghasilkan buah yang manis”. Inilah yang harus dilakukan dalam sistem pendidikan kita, yaitu menjadikan setiap individu sukses dan produktif sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing.

Ketiga, mengkaji apakah tujuan dan strategi pendidikan telah tertuang di dalam kurikulum yang memang relevan untuk kondisi jaman. Misalnya, apakah pelaksanaan Undang-undang pasal 3 nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya (berkembangnya potensi siswa dan berkarakter) sudah sejalan dengan pelaksanaan kurikulum yang hanya mengandalkan aspek kognitif saja (hafalan).

Begitu pula perkembangan jaman begitu cepat, sehingga para siswa harus disiapkan untuk mampu berkiprah sesuai dengan kondisi jamannya. Pengalaman Singapura⁹ misalnya, secara berkala tujuan dan strategi pendidikannya telah diubah sesuai dengan kebutuhan jaman. Pada periode tahun 1960an dan 1970an, Singapura masih membenahi struktur pendidikannya sehingga kontrol pemerintah masih kuat untuk mempersiapkan gedung, guru, dan melakukan standarisasi pendidikan. Selain itu, mempersiapkan SDMnya yang multi-etnis dan agama untuk dapat hidup berdampingan dengan damai, serta dapat siap kerja ke sektor industri (*labour-intensive*). Pada tahun 1980an, sistem *streaming* (penjurusan) dilakukan sejak kelas 4 SD, dan selanjutnya pada tingkat SLTP agar seluruh siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya, sehingga mereka lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. Maka, otonomi sekolah mulai diperkenalkan karena

sekolahlah yang mengetahui kondisi siswanya. Bahkan sekolah-sekolah negeri yang sudah siap, dijadikan "independent school" dan dapat menyusun kurikulumnya sesuai dengan minat siswa.

Pada tahun 1990an, perubahan menuju kompetisi global sehingga SDMnya perlu disiapkan dengan tujuan: "to produce people who were resilient, resourceful independent life-long learners and problem solvers, able to thrive beyond Singapore's shores. A gradual shift from an emphasis on academic results and book knowledge alone to the development of thinking skills was required to prepare a generation that could thrive in the globalization era". Mereka mencanangkan "Thinking Schools, Learning Nations". Otonomi yang lebih besar diberikan agar setiap sekolah terus berpikir untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga setiap kepala sekolah bertindak seperti CEO yang bertanggung jawab pada seluruh manajemen sekolah, pengembangan guru, dan hubungan pada masyarakat luas termasuk orangtua, industri, dan stakeholders lainnya.

Pada tahun 2000an, dengan semakin murahnya ongkos produksi barang dan jasa karena Cina dan India yang terus berkembang ekonominya, Singapura mengubah strateginya dengan menekankan pada bagaimana para siswanya bisa menjadi manusia yang lebih kreatif lagi untuk berinovasi, serta penuh semangat untuk terus belajar dan meningkatkan diri, serta mempunyai kualitas karakter yang lebih baik (integritas, tanggung jawab sosial, dan kerjasama yang baik). Mereka mencanangkan "Spirit of Innovation and Entreprises).

Secara eksplisit Perdana Menteri Lee mengatakan bahwa seluruh rakyat Singapura harus merasa berhasil dengan bakatnya masing-masing. Berikut uraiannya:¹⁰

"We also want to be an inclusive society, where people feel they have the opportunities to actively contribute and a difference. Valuable contribution can come from talents in the arts, sports, or social work arenas, and need not be purely economic in nature. Everyone, including the disabled and elderly, has something to offer, and should be encouraged to live up to his or her potential"

Untuk itu, otonomi sekolah terus digalakkan agar setiap sekolah dapat menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan siswa.

Keempat, mempersiapkan guru untuk menguasai metode pedagogi yang dapat menghasilkan para siswa yang sesuai dengan yang diinginkan. Menyambung pengalaman Singapura di atas, mereka telah menekankan metode pedagogi yang dapat membuat siswanya kritis, kreatif, percaya diri, cinta belajar, dan berkarakter mulia.

Beberapa model pedagogi berdasarkan penelitian dan pengetahuan terbaru diperkenalkan misalnya, SEED (Strategies for Effective Engagement and Development of Pupils in Primary School) dan SAIL (Strategies for Active and Independent Learning). Termasuk juga Innovative Pedagogies yang sekarang sedang terus dikampanyekan yaitu TLLM (Teach Less, Learn More). Berikut ini adalah komponen TLLM yang harus dilakukan oleh setiap sekolah agar siswanya dapat berkembang sesuai dengan keinginan.

TEACH LESS, LEARN MORE (TLLM)

More...

- Engaged Learning
- For the Learner
- To Excite Passion
- Differentiated Teaching

- Guiding, Facilitating, Modeling (SAL)

- Formative and Qualitative Assessing
- Searching Questions
- Values-centric
- Spirit of innovation and enterprise

Less...

- Drill and Practice
- To Rush through Syllabus
- Out of Fear and Failure
- ‘One-size-fit-all’ Instruction

- Telling (One-way communication)

- Summative and Quantitative Testing
- Textbook Answers
- Grades-centric
- Set Formulae, Standard Answers

Apabila kita bandingkan metode pedagogi yang umumnya dilakukan di Indonesia dengan metode TLLM, maka semua komponen yang berada di sebelah kanan tabel di atas, dilakukan di Indonesia. Sedangkan komponen Teach More (sebelah kiri), hampir tidak dilakukan sama sekali.

D. Pengembangan Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Oleh Indonesia Heritage Foundation

Menyadari kekurangan dalam sistem pendidikan kita, kami mencoba membangun sistem pendidikan alternatif yang diharapkan menjadi model sistem pendidikan yang tepat. Sebuah Yayasan Badan Wakaf (Indonesia Heritage Foundation – IHF) didirikan yang saat ini telah membangun bersama masyarakat lebih dari 200 pusat kegiatan belajar tingkat pra sekolah sudah dibangun, yang saat ini juga telah membangun SD model. IHF adalah yayasan yang bergerak dalam bidang Character Building (Pendidikan Karakter) yang mempunyai visi “Membangun Bangsa Berkarakter” melalui pengkajian, dan pengembangan pendidikan holistik dengan fokus menanamkan 9 pilar karakter. Tujuan yang akan dicapai adalah “Membentuk manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal. Selain itu untuk membentuk manusia yang lifelong learners (pembelajar sejati)”

Adapun 9 pilar karakter ini adalah nilai-nilai luhur universal yang terdiri dari:¹¹

1. Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya
2. Tanggung jawab, Kedisiplinan, dan Kemandirian
3. Kejujuran
4. Hormat dan Santun
5. Kasih Sayang, Kepedulian, dan Kerjasama
6. Percaya Diri, Kreatif, Kerja Keras, dan Pantang Menyerah
7. Keadilan dan Kepemimpinan
8. Baik dan Rendah Hati
9. Toleransi, Cinta Damai, dan Persatuan

Kurikulum yang digunakan adalah “**Kurikulum Holistik Berbasis Karakter**” (*Character-based Integrated Curriculum*), yaitu kurikulum terpadu yang “menyentuh” semua aspek kebutuhan anak. Sebuah kurikulum yang terkait, tidak terkotak-kotak dan dapat merefleksikan dimensi, keterampilan, dengan menampilkan tema-tema yang menarik dan kontekstual. Bidang-bidang pengembangan yang ada di TK dan mata pelajaran yang ada di SD yang dikembangkan dalam konsep pendidikan kecakapan hidup yang terkait dengan pendidikan personal dan sosial, pengembangan berpikir/kognitif, pengembangan karakter dan pengembangan persepsi motorik juga dapat teranyam dengan baik apabila materi ajarnya dirancang melalui pembelajaran yang terpadu dan menyeluruh (Holistik).

Pembelajaran holistik terjadi apabila kurikulum dapat menampilkan tema yang mendorong terjadinya eksplorasi atau kejadian-kejadian secara autentik dan alamiah. Dengan munculnya tema atau kejadian yang alami ini akan terjadi suatu proses pembelajaran yang bermakna dan materi yang dirancang akan saling terkait dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam kurikulum.

Pembelajaran holistik berlandaskan pada pendekatan *inquiry* dimana anak dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi dan berbagi gagasan. Anak-anak didorong untuk berkolaborasi bersama teman-temannya dan belajar dengan “*cara*” mereka sendiri. Anak-anak diberdayakan sebagai si pembelajar dan mampu mengejar kebutuhan belajar mereka melalui tema-tema yang dirancang.

Sebuah pembelajaran yang holistik hanya dapat dilakukan dengan baik apabila pembelajaran yang akan dilakukan **alami-natural-nyata-dekat dengan diri anak**, dan guru-guru yang melaksanakannya memiliki pemahaman konsep pembelajaran terpadu dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan kreativitas dan bahan-bahan/sumber yang kaya serta pengalaman guru dalam berlatih membuat model-model yang tematis juga sangat menentukan kebermaknaan pembelajaran.

METODE PEDAGOGI¹²

1. Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta

- relevan dalam konteks kehidupannya (*student active learning, contextual learning, inquiry-based learning, integrated learning*)
2. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (*conducive learning community*) sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan, tanpa ancaman, dan memberikan semangat.
 3. Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek *knowing the good, loving the good, and acting the good*.
 4. Metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga 9 aspek kecerdasan manusia.
 5. Seluruh pendekatan di atas menerapkan prinsip-prinsip *Developmentally Appropriate Practices*.

Model pendidikan ini telah diterapkan di lebih dari 220 lokasi dalam program “Semai Benih Bangsa” (SBB), yaitu kegiatan TK alternatif untuk anak-anak yang tidak mampu, dan juga di beberapa TK dan SD swasta dan negeri lainnya. Program ini telah tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di NAD.

E. Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Sudah Mulai Diimplementasikan di Aceh

Model pendidikan holistik berbasis karakter sudah dikembangkan di Aceh melalui kegiatan TK Alternatif Semai Benih Bangsa (SBB) dan beberapa SD negeri lainnya. Saat ini tidak kurang dari 120 lokasi SBB di NAD yang mengadopsi pendidikan holistik berbasis karakter (bekerjasama dengan ExxonMobil dan Cevron), dan akan ada 45 lokasi SBB lagi yang akan dibuka di 4 kabupaten di NAD

Model Pembelajaran Holistik Berbasis Karakter adalah sebuah model yang bukan hanya memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, tapi juga menciptakan atmosfer belajar yang baik guna merangsang minat belajar anak.

1. Guru harus diberikan training sebelum menerapkan model pembelajaran ini di sekolah. Tujuan dari training ini adalah memotivasi dan membentuk guru agar dapat menjadi guru yang ramah dan penyayang yang dapat memotivasi anak serta dengan tulus dapat memberikan cintanya secara tulus pada anak. Dalam training, guru akan memperoleh berbagai pengetahuan terbaru yang aplikatif dapat diterapkan langsung, seperti Pendidikan yang Patut Menurut Perkembangan Anak (*Developmentally Appropriate Practices*), Pembelajaran yang Sesuai dengan Kerja Otak (*Brain-based Learning*), Metode Belajar Aktif (*Student Active Learning & Inquiry-based Learning*), Komunikasi Efektif, Manajemen Kelas, Teknik Bercerita, dll. Kemampuan guru ini akan membantu anak di sekolah dalam hal:
 - a. Menumbuhkan rasa percaya diri anak
 - b. Anak merasa aman dan nyaman
 - c. Mengembangkan perasaan anak bahwa dirinya memiliki kemampuan dan dihargai sebagai seorang individu yang unik

- Hubungan emosional yang kuat antara guru dan anak akan terjalin dan menjadi modal utama untuk membantu anak-anak di kelas. Terutama bagi anak-anak yang mengalami trauma, karena dengan demikian akan terbentuk kepercayaan, juga perasaan aman dan nyaman di kelas.
2. Model ini juga memberikan kesempatan yang luas pada anak untuk mengembangkan seluruh dimensi holistik yang dimilikinya sebagai dari seorang manusia. Tidak hanya pengembangan aspek kognitif (otak kiri atau hapalan), tapi juga pengembangan aspek emosi, sosial, kreativitas, dan spiritualitas (otak kanan) yang keseluruhannya tercakup di dalam modul pembelajaran. Dengan metode ini, anak-anak yang mengalami trauma memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya baik secara verbal, melalui gambar, permainan, tulisan, ataupun bentuk lainnya sehingga dapat mengurangi rasa takut dan tidak nyaman.
 3. Model pembelajaran ini bertujuan untuk membentuk karakter positif anak melalui pengembangan 9 Pilar Karakter secara intensif. Yaitu meliputi aspek mengetahui, mencintai dan melakukan kebaikan (*knowing, loving, and acting the good*). Metode ini akan membentuk suasana kelas yang bersahabat, kebersamaan, saling mendukung dan menghargai dengan sesama temannya.
 4. Model ini juga menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan demikian guru dapat memberikan pengalaman belajar yang konkrit, kontekstual sehingga merangsang anak belajar secara aktif, menyenangkan dan tanpa beban. Pada umumnya di kelas yang menggunakan metode lama (klasikal), anak akhirnya merasa terbebani karena penggunaan alat bantu mengajar yang tidak sesuai dengan perkembangan anak, metode mengajar yang tidak sesuai dengan kerja otak, dan cara komunikasi guru yang tidak tepat. Karena itulah Model Pembelajaran Holistik Berbasis Karakter ini tepat bagi anak-anak yang mengalami trauma.
 5. Karena dalam metode pembelajaran ini anak diberikan banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar nyata secara langsung (*hands-on activities*, seperti misalnya kegiatan matematika, sains, memasak, berkebun), maka anak akan memiliki perasaan bahwa dirinya memiliki kemampuan. Perasaan bahwa dirinya mampu akan berkembang pada tumbuhnya rasa percaya diri. Selain itu akan tumbuh pula kerja sama diantara anak. Karakter ini akan membantu anak untuk mengatasi rasa traumanya dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa di masa depannya nanti ia akan berhasil.

Lokasi belajar sekolah tersebut tidak menuntut bangunan yang mewah, tetapi bisa dilaksanakan di mana-mana, seperti di garasi, teras, musala, balai desa, dan sebagainya. Penyelenggaraan sekolah tersebut banyak menggunakan *meunasah* (kolong masjid panggung) sebagai lokasi belajar. Dahulu biasanya *meunasah* digunakan sebagai kandang ternak, tetapi setelah diubah, dibersihkan, dan ditata ulang maka bisa menjadi ruang kelas yang menyenangkan. Kenyataan menunjukkan bahwa para siswa ternyata mereka tetap merasa betah belajar di sekolah-sekolah tersebut.

Memang tampaknya seperti sekolah "kelas kampung" apabila dibandingkan dengan TK-TK swasta yang sudah ada. Akan tetapi apabila melihat *output* model pendidikan holistik

berbasis karakter ternyata memang lebih bagus, maka model pendidikan semacam ini yang memang selayaknya dimasyarakatkan secara lebih luas.

Aceh saat ini telah memiliki dana pendidikan yang sangat memadai, namun harus diingat bahwa bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengoptimalkan penggunaan dana itu secara tepat sasaran dalam melaksanakan pembangunan pendidikan pendidikan secara konsisten, amanah, bertanggung jawab dan profesional. Tingginya sifat amanah dan tanggung jawab seluruh pihak dalam menabur bakti pada rakyat, negara, dan agama sangatlah dibutuhkan. Kalau masih tidak memahami prioritas dan tidak konsisten, “*si uroe lhee goe luhoe*” (satu hari tiga kali zuhur) atau dalam pepatah Malaysia “cakap tidak serupa bikin”, maka pembangunan pendidikan di Aceh masih menghadapi banyak kesulitan.

Insyallah, sebagaimana slogan Malaysia, “*Malaysia Boleh*”, dengan membangun sistem pendidikan dengan cemerlang dalam kurun 45 tahun tersebut, maka mestinya kita juga bisa “*Pakoen geutanyoe Hanjeut?*” maka semua upaya tersebut akhirnya akan mengembalikan maruah dan martabat seluruh masyarakat di Aceh.

Wallahu a'lam bisshawab wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banda Aceh, 2 September 2006

Referensi:

¹ Fukuyama, Francis. Trust: The Social Virtues, and the Creation of Prosperity. (New York: The Free Press, 1995)

² Loren Cobb, *The Path to a Durable Peace*, The Quaker Economist, Volume 4, Number 110, 20 October 2004.

³ Menurut data PERC 2005.

⁴ Gelb, Alan H. and Associates. “Oil Windfalls: Blessing or Curse?” A World Bank Research Publication. (London: Oxford University Press, 1988)

⁵ Kottler, Phillip. The Marketing of Nations (Free Press, 1997)

⁶ Kottler, *ibid*

⁷ Madjid, A. Shabri. “Mengendalikan Ruh dan Citra Pendidikan di Aceh”.

http://www.acehinstitute.org/artikel_ilmiah_shabri_mengembalikan_roh_pendidikan_aceh.htm

⁸ Gardner, H. (1993). *Multiple intelligences: The theory in practice*. New York: BasicBooks.

⁹ Ministry of Education, Republic of Singapore. Speech by Mr. Tharman Shanmugaratnam, at the MOE Work Plan Seminar 2005 on Thursday, 22 September 2005 at the Ngee ANN Polytechnic Convention Centre.

¹⁰ Quality in Education – Responding to National Development Priorities. 41st SEAMEO Council Conference Policy Forum. Singapore,

¹¹ Megawangi, Ratna. “Pendidikan Karakter: Solusi Tepat Untuk Membangun Bangsa” (Indonesia Heritage Foundation, 2004).

¹² Megawangi, Ratna; Melly Latifah dan Farrah Dina. “Pendidikan Holistik: Untuk Membangun Manusia yang Lifelong Learners”. (Indonesia Heritage Foundation, 2004).

Referensi:

-
- ¹ Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues, and the Creation of Prosperity*, (New York: The Free Press, 1995)
- ² Loren Cobb, *The Path to a Durable Peace*, The Quaker Economist, Volume 4, Number 110, 20 October 2004.
- ³ Menurut data PERC 2005.
- ⁴ Gelb, Alan H. and Associates. "Oil Windfalls: Blessing or Curse?" A World Bank Research Publication. (London: Oxford University Press, 1988)
- ⁵ Kottler, Phillip. The Marketing of Nations (Free Press, 1997)
- ⁶ Kottler, *ibid*
- ⁷ Madjid, A. Shabri. "Mengendalikan Ruh dan Citra Pendidikan di Aceh".
http://www.acehinstitute.org/artikel_ilmiah_shabri_mengembalikan_roh_pendidikan_aceh.htm
- ⁸ Gardner, H. (1993). *Multiple intelligences: The theory in practice*. New York: BasicBooks.
- ⁹ Ministry of Education, Republic of Singapore. Speech by Mr. Tharman Shanmugaratnam, at the MOE Work Plan Seminar 2005 on Thursday, 22 September 2005 at the NGEE ANN Polytechnic Convention Centre.
- ¹⁰ Quality in Education – Responding to National Development Priorities. 41st SEAMEO Council Conference Policy Forum. Singapore,
- ¹¹ Megawangi, Ratna. "Pendidikan Karakter: Solusi Tepat Untuk Membangun Bangsa" (Indonesia Heritage Foundation, 2004).
- ¹² Megawangi, Ratna; Melly Latifah dan Farrah Dina. "Pendidikan Holistik: Untuk Membangun Manusia yang Lifelong Learners". (Indonesia Heritage Foundation, 2004).